

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dan Instansi Pemerintah Kota Pariaman

Mutia Rahmatul Husna<sup>1)</sup>, Armel Yentifa<sup>2)</sup>, Eka Rosalina<sup>3)</sup>

<sup>1)2)</sup> Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Padang  
Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

<sup>1)</sup> [armel@pnp.ac.id](mailto:armel@pnp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan target anggaran, keunggulan SDM, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Survei kuantitatif adalah teknik penelitian yang digunakan. Partisipan dalam studi ini adalah kepala dinas/badan/instansi, sekretaris, bendahara pada bagian pendapatan dan bendahara pada bagian pengeluaran, serta subbagian keuangan yang menangani tugas akuntansi atau keuangan masing-masing instansi. Dengan jumlah responden sebanyak 110 orang, teknik *purposive sampling* digunakan untuk melakukan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui kuesioner. Program SPSS v.25 digunakan untuk mengolah data. Akuntabilitas kinerja anggaran dipengaruhi oleh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran. Secara parsial faktor-faktor akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan pada Kota Pariaman. Sementara itu, faktor kualitas SDM tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pariaman. Secara simultan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pariaman juga ditingkatkan melalui kejelasan sasaran anggaran, keunggulan sumber daya manusia, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, SDM yang Baik, Pengendalian Akuntansi

### Abstract

*This study intends to determine how the performance accountability of government agencies is influenced by budget target clarity, HR excellence, accounting controls, and reporting systems. Quantitative survey is the research technique used. The participants in this study were the head of the agency, the secretary, the treasurer in the revenue section and the treasurer in the expenditure section, as well as the finance subdivision that handles the accounting or financial tasks of each agency. With a total of 110 respondents, purposive sampling technique was used to conduct sampling. In this study, information was collected through questionnaires. SPSS v.25 program was used to process the data. Budget performance accountability is influenced by accounting controls, reporting systems and budget target clarity. Partially, the factors of government performance accountability are influenced by the clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems in Pariaman City. Meanwhile, the quality factor of human resources has no effect on the performance accountability of government agencies in Pariaman City. Simultaneously, the accountability of Pariaman City government performance is also improved through budget target clarity, human resource excellence, accounting controls, and reporting systems.*

**Keywords:** *Accountability of Government Agency Performance, Clarity of Budget Targets, Good Human Resources, Accounting Control*

### 1. PENDAHULUAN

Manajemen anggaran pemerintahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara. Tercapainya akuntabilitas publik dimungkinkan secara ekonomi, efisien, adil dan merata dengan sumber daya yang digunakan. Hak dan kewenangan pemerintahan daerah merupakan

bagaimana penggunaan dana sesuai dengan keperluan dan keinginan masyarakat. Komponen tata usaha pemerintahan yang teratur adalah meningkatkan akuntabilitas yang berdampak pada pemberantasan korupsi. Selain itu, korupsi memiliki dampak negatif atas kesejahteraan masyarakat, karena bisa terjadi ketidakadilan serta efisiensi dalam alokasi dan pemakaian sumber daya. Seseorang dapat meningkatkan akuntabilitas dengan cara ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan keuangan agar pemerintah dapat tegas menjunjung tinggi akuntabilitas anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporannya.

Anggaran diartikan dengan tepat dan jelas sehingga pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran merupakan definisi dari kejelasan tujuan anggaran (Putra 2013). Anggaran bertujuan untuk disajikan dengan jelas, mudah dipahami dan spesifik agar bisa bertanggung jawab dalam menyusun dan mengimplementasikannya. Pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan penggunaan anggaran agar berpengaruh terhadap kegiatan instansi pemerintah yang harus didukung sumber daya manusia (pegawai kompeten dibidang tersebut). Mutu SDM adalah kemahiran seseorang dalam melakukan wewenang serta tanggungjawabnya terhadap pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai dibidangnya (Budiani & Asyik 2021). Dengan adanya sumber daya aparatur yang berkualitas akan meningkatkan kualitas penyelenggara negara dan pemerintah. Apabila sebuah instansi pemerintah mempunyai SDM yang baik, tentunya akan memengaruhi kualitas kinerjanya. Sejalan dengan target anggaran dan kualitas SDM untuk meningkatkan tanggung jawab kinerja, lembaga pemerintah juga turut didukung oleh peran pengendalian akuntansi yang akuntabilitas. Untuk mewujudkan akuntabilitas, tentunya laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam lingkungan sektor publik. Pengendalian akuntansi adalah sistem yang menggunakan informasi untuk melindungi dan mengganti model operasional suatu instansi (Budiani & Asyik 2021). Pengendalian akuntansi dapat mendorong pemerintah mengambil keputusan yang lebih bijak, menaksir biaya, profitabilitas, mengelola operasi dengan lebih efektif serta memilih cara terbaik untuk meningkatkan kinerja untuk setiap kasus dan masalah. Faktor lain yang bisa mempengaruhi tanggung jawab operasional instansi pemerintah yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan bertugas menyampaikan dan melaporkan seluruh aktivitas dan sumber daya yang ditetapkan. Diperlukan sistem pelaporan untuk mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui (Budiani & Asyik 2021).

AKIP dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 yaitu akuntabilitas serta peningkatan kinerja lembaga pemerintah melalui penerapan sistem tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah. Tujuan dari penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk menentukan sejauh mana AKIP diterapkan, mendorong peningkatan yang ditargetkan dalam tujuan dan hasil lembaga pemerintah.

Fokus dari studi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pariaman. Pembeda antara studi yang penulis lakukan dengan studi sebelumnya adalah terletak pada lokasi, objek dan tahun dilakukannya penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan lembaga yang dengan fungsi manajemen dan kepemilikannya dipisahkan lebih rentan terjadinya konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Dimana pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui metode pelaporan, sehingga pemerintah pusat bisa menaksir, mengevaluasi serta memantau kegiatan pemerintah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulya & Fauzihardani, 2022). Menurut Wibisono

(2016) menyatakan bahwa akuntabilitas bisa dipahami kewajiban pemerintah sebagai agen agar memberikan amanat, menyediakan, melaporkan dan memaparkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab untuk masyarakat sebagai prinsipal serta berhak dan berwenang menuntut akuntabilitas.

## **2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Berdasarkan Rininda and Sudaryati (2020) anggaran merupakan instrumen keuangan yang sangat dibutuhkan dan digunakan oleh pemerintah dalam memfasilitasi dan melaksanakan agenda yang sudah disetujui. Penganggaran merupakan alokasi dana yang terbatas untuk membiayai pengeluaran organisasi yang biasanya terbatas. Penganggaran ialah suatu langkah yang digunakan oleh sekelompok sektor publik dalam mendistribusikan sumber daya serta keinginan yang tidak terbatas (Madjid, 2019). Sementara kejelasan tujuan anggaran adalah sejauh apa tujuan anggaran ini dijelaskan dengan tepat sehingga pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan tujuan anggaran memahami anggaran tersebut. Tujuan anggaran sektor publik yaitu untuk mendapatkan tujuan serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas dan tingkat kesulitan merupakan pengukuran yang digunakan menurut Budiani & Asyik (2021).

## **2.3 Keunggulan SDM**

Menurut Okvita (2022) sumber daya yang baik merupakan individu yang memiliki edukasi, kemahiran dan keahlian memadai untuk melakukan pekerjaan, wewenang serta bertanggung jawab. Kualitas SDM adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan dan memiliki bekal pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang mencukupi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan (Azizah, 2020). Sumber daya manusia pada dasarnya terdiri dari pengetahuan, keterampilan, daya, karya, dorongan, keinginan dan perasaan. Berkualitasnya sumber daya manusia bisa dilihat dari kompetensi sumber daya tersebut dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan bidangnya untuk mencapai optimalisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Budiani & Asyik (2021) menggunakan indikator a). Integritas, b). Kejujuran, c). Profesionalisme, d). Pelatihan, e) Tanggungjawab, f). Disiplin.

## **2.4 Pengendalian Akuntansi**

Sistem pengendalian manajemen sektor publik berpusat terhadap penerapan strategi organisasi terukur sehingga apa yang menjadi keinginan kelompok dapat diperoleh (Mardiasmo, 2018). Sistem pengendalian manajemen perlu didukung struktur organisasi agar dapat sejalan dengan pengendalian manajemen yang dipakai, pengelolaan SDM dan lingkungan pendukungnya. Sistem pengendalian akuntansi merupakan tahapan yang menggunakan informasi agar melindungi serta merubah alur sebuah organisasi. Pengendalian akuntansi merupakan mekanisme perencanaan, prosedur serta sistem untuk melindungi asset serta aktiva suatu organisasi (Mulya & Fauzihardani, 2022). Menurut Budiani & Asyik (2021) menggunakan indikator a). Pemeriksaan, b). Evaluasi sistematis, c). Penetapan target anggaran, d). Jangka waktu, e). Otorisasi, f). Bukti transaksi, g). Pencatatan transaksi, h). Pembaharuan catatan akuntansi, i). Persetujuan laporan keuangan.

## **2.5 Sistem Pelaporan**

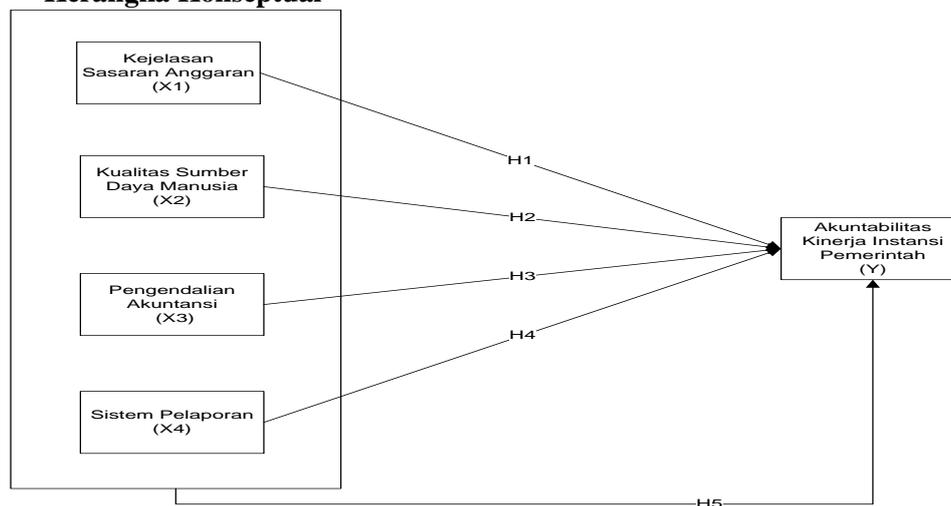
Menurut Anisa & Haryanto (2022) sistem pelaporan merupakan penyajian informasi keuangan dan non keuangan yang menggambarkan akuntabilitas pertanggungjawaban bawahan kepada atasan. Untuk memudahkan pimpinan unit dalam mengendalikan dan menjalankan kinerja serta anggaran yang sudah ditetapkan, dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik dan mendukung. Memberikan informasi keuangan kepada pihak berkepentingan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang digunakan dalam mengambil keputusan baik dalam hal ekonomi, sosial maupun politik. Standar, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan laporan kinerja merupakan indikator yang digunakan menurut Budiani & Asyik (2021).

## **2.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Yulianto & Muthaher (2019) akuntabilitas merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya misi organisasi, yang dilakukan secara berkala melalui media akuntabilitas. Kinerja adalah cara melakukan kegiatan atau program maupun

keputusan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Jadi, akuntabilitas secara eksplisit diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian kegiatan, nalar dan langkah secara sistematis yang bertujuan agar menentukan dalam pengumpulan data serta dapat mengukur dan memperjelas pengikhtisaran pelaporan kinerja lembaga pemerintah. Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah adalah tanggung jawab serta meningkatkan kinerja lembaga pemerintah karena tujuannya untuk mengetahui sejauh apa AKIP diterapkan untuk mendorong meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan ditargetkan kepada tujuan dan hasil lembaga pemerintah. Menurut Budiani & Asyik (2021) menggunakan indikator a). Rencana kinerja, b). Pelaporan kinerja, c). Prosedur penganggaran, d). Evaluasi internal, e). Hasil kinerja, f). Pemanfaatan informasi kinerja.

## 2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan gambar 1 di atas, diperoleh perumusan hipotesis yaitu:

- H1 : Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dipengaruhi secara positif oleh kejelasan target anggaran.
- H2 : Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dipengaruhi secara positif oleh Kualitas SDM.
- H3 : Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas kinerja pemerintah.
- H4 : Sistem pelaporan memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas kinerja pemerintah.
- H5 : Pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kualitas sumber daya manusia, dan kejelasan target anggaran semuanya berdampak pada akuntabilitas lembaga pemerintah atas kerjanya.

## 3. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan jenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada studi ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, dimana data yang dibutuhkan yaitu data langsung didapat dari daftar pertanyaan yang dibagikan langsung kepada pejabat struktural dan pegawai bagian keuangan. Kuesioner penelitian diberikan langsung pada tempat subjek bekerja yaitu 22 Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sehingga populasi penelitian berjumlah 110 responden. Data tersebut kemudian di olah menggunakan SPSS 25. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Kuesioner diolah menurut skala ordinal dan menurut skala likert yang penilaiannya dari 1 sampai 4. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji parsial,

uji F, uji koefisien determinasi, uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, dan analisis regresi linier berganda.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memvisualisasikan angka dalam bentuk nilai *mean*, standar deviasi, varians, nilai max., nilai min. dan skewness (perbedaan distribusi). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Output Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	110	16	24	20	2
Kualitas Sumber Daya Manusia	110	13	20	17	2
Pengendalian Akuntansi	110	21	32	27	3
Sistem Pelaporan	110	13	20	17	2
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	110	28	40	33	3
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Terlihat dari daftar di atas, menunjukkan sebaran datanya cukup baik, dikarenakan nilai standar deviasi yang diperoleh tiap variabel lebih rendah dari nilai *mean*. Oleh karena itu, standar deviasi mencerminkan jumlah penyimpanan yang besar sehingga data melihatkan hasil yang baik.

##### 4.2 Uji Kualitas Data

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan melihat uji kualitas data dalam studi ini. Hasil dari penelitian menunjukkan analisis variabel seluruh item pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid dan reliabel. Dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > 0,444 pengujian validitas dengan nilai *cronbach alpha* > 0,70 pada pengujian reliabilitas dengan nilai variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu 0,723, kualitas SDM yaitu 0,853, pengendalian akuntansi yaitu 0,856, sistem pelaporan yaitu 0,925 serta akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu 0,901.

##### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada studi ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini menunjukkan *output* bahwa model regresi dapat dilakukan, gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas tidak terdapat pada pengujian ini. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi unstandardized residual yaitu sebesar 0,191. Variabel kejelasan anggaran mempunyai nilai VIF sebesar 1,774, kualitas SDM sebesar 1,525, pengendalian akuntansi sebesar 2,457 serta sistem pelaporan sebesar 2,184 dan nilai tolerance variabel kejelasan tujuan anggaran sebesar 0,564, kualitas SDM sebanyak 0,656, pengendalian akuntansi sebesar 0,407 dan sistem pelaporan sebesar 0,458. Dan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik tersebar antara titik nol yaitu di atas dan dibawah sumbu Y.

##### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel berikut menunjukkan hasil pengolahan program SPSS 25 terhadap analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2 *output* Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,439	2,142		1,606	0,111
	KSA	0,239	0,118	0,152	2,023	0,046
	KSDM	0,201	0,117	0,119	1,712	0,090
	PA	0,520	0,107	0,431	4,877	0,000
	SP	0,447	0,145	0,257	3,082	0,003

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Dari tabel diatas, terlihat persamaan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 3,439 + 0,239X_1 + 0,201X_2 + 0,520X_3 + 0,447X_4 + e$$

#### 4.5 Uji F

Pengujian simultan adalah uji statistik terhadap kelayakan koefisien regresi variabel bebas secara keseluruhan memiliki pengaruh pada variabel terikat secara simultan. *Output* ini dapat dilihat pada tabulasi dibawah ini:

Tabel 3 *Output* Uji Simultan  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	781,236	4	195,309	52,333	,000 <sup>b</sup>
	Residual	391,864	105	3,732		
	Total	1173,100	109			

Tabel di atas melihat bahwa nilai F sebesar 52,333, dan nilai sig. < 0,05 yaitu sebesar ,000. Hal tersebut menunjukkan kejelasan target anggaran, kualitas SDM, pengendalian akuntansi serta sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian R2 bertujuan melihat besarnya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Nilai koefisien determinasinya berkisar dari 0-1. Berikut disajikan hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4 *output* Pengujian R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square
	,816	0,666	0,653

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Tabel diatas melihat bahwa variabel kejelasan tujuan anggaran, kualitas SDM, pengelolaan akuntansi serta sistem pelaporan memiliki pengaruh pada variabel akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah sebanyak 65,3% sedangkan 34,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji pada studi ini.

#### 4.7 Pembahasan

##### Kejelasan Target Anggaran Berpengaruh Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah

Pengujian statistik menunjukkan kejelasan tujuan anggaran mempunyai nilai sig. senilai 0,046 < 0,05. Ini menyatakan bahwa kejelasan target anggaran memiliki pengaruh pada tanggung jawab kinerja instansi pemerintah. Studi ini menyatakan Kota Pariaman sudah menetapkan anggaran secara jelas dan menunjukkan bahwa organisasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik. Oleh karena itu, penerapan kejelasan tujuan anggaran yang semakin baik dapat mendorong kinerja dari lembaga pemerintah. Sejalan dengan penelitian Budiani & Asyik (2021) dan Azizah (2020), bahwa kejelasan tujuan anggaran dengan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah berbanding lurus atau berhubungan positif. Yang berarti penerapan kejelasan sasaran anggaran pada suatu instansi yang semakin jelas maka tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah akan menjadi lebih jelas. Begitu juga sebaliknya, apabila kejelasan tujuan anggaran tidak jelas maka akan menurunkan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah. Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan, dimana hubungan keagenan timbul apabila terdapat satu atau lebih pihak prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan jasanya yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusannya kepada pihak yang diberikan pendelegasian wewenang tersebut. Implikasi dari penelitian ini bahwa pemerintah daerah agar dapat memberikan informasi sasaran anggaran yang lebih jelas kepada publik. Sehingga masyarakat bisa melihat apakah dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

##### Akuntabilitas kinerja Lembaga pemerintah dipengaruhi oleh kualitas SDM

Hasil pengujian statistik menunjukkan kualitas SDM mempunyai nilai sig. sebesar 0,090 yang lebih besar dari 0,05 (0,090 > 0,05), yang berarti mutu tenaga kerja tidak memiliki pengaruh pada tanggung jawab kinerja pemerintah. Pengujian studi ini menunjukkan Kota Pariaman dalam penerimaan pegawainya tidak didasarkan pada latar belakang pendidikannya, namun kepada apakah tenaga kerja dapat melaksanakan tugasnya sesuai pedoman SOP pemerintah yang sudah ditentukan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Budiani & Asyik (2021), bahwa mutu tenaga

kerja atau SDM tidak berpengaruh pada tanggung jawab kinerja instansi pemerintah. Yang berarti OPD saat masa covid-19, rekrutmen pegawainya secara sistematis tidak didasarkan pada pendidikan yang dimiliki oleh pegawai tersebut, tetapi lebih kepada apakah pegawai yang bersangkutan mampu menjalankan tugas yang diberikan dan fungsi dari bagian pegawai tersebut. Kualitas SDM merupakan hal yang sangat dibutuhkan pada setiap instansi agar bisa meningkatkan produktivitas kerja di lingkungannya. Kualitas SDM juga berperan penting dalam organisasi yang bertujuan merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan supaya memperoleh kinerja yang sejalan dengan metode yang sudah ditentukan, sehingga tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah bisa diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa sumber daya yang berkualitas akan lebih mampu berpikir kreatif dan berkontribusi untuk pemerintah dalam mengatasi tantangan baru dan meningkatkan pelayanan publik.

#### **Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah dipengaruhi Pengendalian Akuntansi**

Uji statistik melihat nilai sig. pengendalian akuntansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), yang berarti pengendalian akuntansi mempengaruhi instansi pemerintah berkenaan dengan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah. Hal ini menyatakan laporan keuangan harus dibentuk dengan transparan sesuai dengan pengendalian akuntansi, sehingga keterbukaan laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Sejalan dengan penelitian Anisa & Haryanto (2022) yang menyatakan pengendalian akuntansi berbanding lurus dengan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah atau berhubungan positif. Pengendalian akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan pada suatu instansi harus jujur. Kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk dari keterbukaan. Keterbukaan tersebut merupakan salah satu syarat pendukung dari adanya tanggung jawab berupa transparansi instansi pemerintah daerah yang menjalankan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat dalam melakukan pengendalian akuntansi melewati metode pembentukan laporan keuangan yang transparan, jujur, akuntabel terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang dikelola. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengendalian akuntansi membantu memastikan informasi keuangan pemerintah disajikan dengan jelas dan transparan.

#### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh Sistem Pelaporan**

Uji statistik menyatakan sistem pelaporan mempunyai nilai sig. sebanyak 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), diperoleh kesimpulan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh pada tanggung jawab kinerja pemerintah. Pengujian ini menyatakan bahwa sistem pelaporan telah diterapkan sesuai standar dan peraturan yang telah ditentukan, oleh sebab itu tanggung jawab dengan pelaporan mudah terpenuhi oleh pemerintah. Dapat disimpulkan, sistem pelaporan yang benar juga meningkatkan tanggung jawab kinerja pemerintah. Hasil pengujian ini didukung oleh Budiani & Asyik (2021), yang menyatakan terdapatnya pengaruh sistem pelaporan dengan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah. Yang berarti pelaporan kinerja sudah dilakukan menurut standar dan ketentuan peraturan UU yang berlaku, sehingga pelaporan kinerja mudah diakses dari sudut pandang instansi. Penelitian ini merupakan bagian integral dari teori keagenan bahwa pembentukan laporan keuangan suatu instansi adalah salah satu bentuk dari keterbukaan yang merupakan tanggungjawab dari instansi tersebut yang termasuk dalam salah satu syarat pendukung. Pemerintah sebagai agen wajib menyajikan laporan keuangan yang berarti bagi pihak yang memiliki kepentingan pada informasi dapat diperoleh pada laporan keuangan tersebut. Pihak yang memiliki kepentingan ini bertindak sebagai prinsipal yang menilai tanggung jawab dari instansi tersebut dan menggunakan informasi yang didapat sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa sistem pelaporan yang transparan dan terbuka oleh pemerintah daerah bisa membantu masyarakat untuk memahami tujuan, kegiatan dan hasil kinerja lembaga pemerintah daerah.

### **5. KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah Kota Pariaman. Pada studi ini ada beberapa faktor yang diduga

mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah yang terdiri dari kejelasan target anggaran, kualitas SDM, pengelolaan akuntansi serta sistem pelaporan. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa kejelasan target anggaran, pengelolaan akuntansi serta metode pelaporan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah Kota Pariaman. Sementara kualitas SDM tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pariaman. Studi ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: penelitian yang dilakukan tidak disertai wawancara sehingga belum mendapatkan hasil yang mendalam, daftar pertanyaan dalam kuesioner masih bersifat umum, sampel penelitian tidak melibatkan bagian perencanaan sehingga sampel masih terbatas pada pejabat struktural dan pegawai bagian keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, berikut terdapat saran oleh peneliti yaitu:

1. Bagi peneliti berikutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian, tidak hanya mengambil sampel kepala dinas/badan/instansi, sekretaris, bendahara bagian penerimaan, bendahara bagian pengeluaran dan kasubag keuangan, tetapi untuk pegawai bagian keuangan lainnya seperti pegawai perencanaan.
2. Dengan adanya kejelasan target anggaran, kualitas SDM, pengelolaan akuntansi serta metode pelaporan yang baik mendorong peningkatan keterampilan instansi pemerintah. Pengendalian finansial yang baik pada pemerintah Kota Pariaman yang bertujuan membantu peningkatan tanggung jawab kinerja suatu lembaga.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan *interview* kepada para responden sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Indah Nur, and Haryanto Haryanto. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Aktual* 9(1): 77–85.
- Azizah, Awwaliyah. 2020. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1(1): 1–14.
- Budiani, Lutfiah V, and Nur F Asyik. 2021. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(2): 1–20.
- Madjid, Jamaludin. 2019. Yogyakarta *Akuntansi Sektor Publik*. [http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI\\_SEKTOR\\_PUBLIK\\_Dana\\_Umum\\_Genera.docx](http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meckling, Michael C. Jensen & William H. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Human Relations* 72(10): 1671–96.
- Mulya, Helin Gustri, and Eka Fauzihardani. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4(1): 192–212.
- Okvita, Sherel Audry. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Komitmen Manajemen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pelaporan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Stat." *Material Safety Data Sheet* 33(1): 1–12. [http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf).
- "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." 2015. *Независимое Военное Обозрение* (16.1.2015).
- "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014." 2015. *Galang Tanjung* (2504):

- 1–9.
- Putra, Deki. 2013. “Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).” *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*: 1–26.
- Rininda, Bella Puspita, and Erina Sudaryati. 2020. “Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(5): 1099.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” 2014.
- “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” 2004. 101(3): 55.  
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Wibisono, Seto. 2016. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(9): 1–22.
- Yulianto, Ahmad Rudi, and Osmad Muthaher. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.” *Tirtayasa Ekonomika* 14(2): 204.

## **BIODATA PENULIS**

Mutia Rahmatul Husna, lahir di Pariaman Sumatera Barat. Lulusan Politeknik Negeri Padang. Penulis bisa dihubungi melalui email: [mutiarahmatulhusna12@gmail.com](mailto:mutiarahmatulhusna12@gmail.com)

Armel Yentifa. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Padang. Penulis bisa dihubungi melalui email: [armel@pnp.ac.id](mailto:armel@pnp.ac.id)

Eka Rosalina. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Padang. Penulis bisa dihubungi melalui email: [ekarosalinapnp5@gmail.com](mailto:ekarosalinapnp5@gmail.com)